

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan adalah kebutuhan dasar atau primer dalam kehidupan manusia yang berfungsi menunjang kesehatan melalui mengonsumsi makanan yang bergizi. Namun, keberadaan pangan tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhan gizi, melainkan diharapkan terjamin keamanannya bagi yang mengonsumsi sehingga tidak menimbulkan *Foodborne disease*. *Foodborne disease* atau penyakit akibat makanan merupakan gangguan kesehatan dimana disebabkan oleh mengonsumsi makanan terkontaminasi oleh bahaya mikrobiologi, fisik, alergen, atau kimia (Dara, 2024). Gangguan kesehatan akibat konsumsi pangan sangat bervariasi, berkisar dari gejala ringan seperti diare hingga kondisi kronis seperti kanker (Annashr, 2023). Salah satu faktor utama yang memicu pangan menjadi agen penularan penyakit adalah buruknya penerapan higiene dan sanitasi. Praktik sanitasi ini sangat dipengaruhi oleh perilaku penjamah makanan, yang memegang kendali krusial dalam menjaga kebersihan di setiap tahapan, mulai dari pengolahan, penyajian, hingga penyimpanan hidangan.

Berdasarkan estimasi *World Health Organization* (WHO), makanan yang terkontaminasi menyebabkan gangguan kesehatan pada sekitar 600 juta orang atau hampir 10% populasi global, dengan fatalitas mencapai 420.000 kematian per tahun. Anak-anak di bawah usia lima tahun menyumbang sekitar 30% dari total kematian tersebut. Di tingkat nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui Aplikasi SPIMKer KLBKP melaporkan adanya 2.442 kasus keracunan pangan di Indonesia sepanjang tahun 2023. Tingginya angka tersebut

menegaskan urgensi sinergi dari berbagai pihak dalam memperketat pengawasan demi menjamin kesehatan dan keamanan pangan masyarakat.

Puskesmas I Denpasar Barat memegang peranan krusial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, salah satunya melalui pengawasan sanitasi makanan. Urgensi pengawasan ini didasari oleh tingginya mobilitas dan aktivitas di wilayah kerja puskesmas tersebut, yang ditandai dengan menjamurnya berbagai tempat pengolahan pangan yang menjadi pusat kunjungan masyarakat. Selain itu, di wilayah tersebut terdapat Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang biasa disebut TPS Monang Maning. TPS ini merupakan salah satu lokasi pembuangan sampah di Kota Denpasar yang menjadi titik keramaian aktivitas masyarakat. Di sekitar area TPS, terdapat pedagang makanan yang menjual berbagai jenis makanan. Lingkungan di sekitar TPS yang diwarnai aroma tidak sedap, polusi udara, serta vektor penyakit seperti lalat, kecoak, dan tikus, memperbesar peluang terjadinya kontaminasi silang pada produk pangan di sekitarnya. Ancaman ini akan kian memburuk jika pedagang mengabaikan kaidah hygiene dan sanitasi. Mengingat penjamah makanan memegang kendali penuh atas higienitas personal, sterilitas peralatan, hingga proses penyajian, maka perilaku buruk seperti tidak mengenakan APD, tidak mencuci tangan, atau membiarkan hidangan terbuka akan mempercepat paparan polutan lingkungan ke dalam makanan. Oleh karena itu, Puskesmas I Denpasar Barat perlu menyusun program promotif dan preventif yang terstruktur serta berkelanjutan. Salah satu langkah konkretnya adalah melalui edukasi berupa penyuluhan kesehatan, yang diproyeksikan mampu memperluas wawasan sekaligus

menumbuhkan komitmen para penjamah makanan untuk menerapkan prinsip sanitasi secara konsisten di setiap fase pengolahan.

Penelitian ini menjadikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 14 Tahun 2021 sebagai acuan utama, mengingat regulasi tersebut memuat standar kegiatan usaha serta produk dalam perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kesehatan, termasuk pemenuhan syarat higiene sanitasi pada Tempat Pengolahan Pangan (TPP) (Permekes, 2021). Regulasi ini menegaskan kewajiban setiap pengelola TPP untuk mematuhi standar tersebut demi menjaga keamanan pangan dan meminimalkan risiko kesehatan masyarakat. Di dalamnya, penjamah makanan diposisikan sebagai pilar krusial karena terlibat langsung dalam rantai pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian hidangan. Adapun indikator higiene sanitasi penjamah makanan yang diatur meliputi pemakaian alat pelindung diri (APD), higienitas personal, perilaku kerja, serta langkah preventif terhadap kontaminasi silang. Berbeda dengan studi terdahulu yang cenderung berorientasi pada aspek pengetahuan teoretis, penelitian ini menitikberatkan pada implementasi nyata higiene sanitasi penjamah makanan yang dapat diobservasi langsung di lapangan. Keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada kedisiplinan dan kepatuhan penjamah dalam menjalankan prinsip-prinsip higienis secara konsisten. Tanpa adanya kesadaran perilaku seperti kepatuhan memakai APD dan menjaga kebersihan diri, pemenuhan standar baku yang diamanatkan oleh Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tidak akan berjalan optimal. Atas dasar tersebut, seluruh parameter pengukuran penerapan higiene sanitasi penjamah makanan dalam penelitian ini diselaraskan dengan standar normatif dalam regulasi tersebut.

Berdasarkan data dari Puskesmas I Denpasar Barat pada periode September hingga Desember 2024 menunjukkan tren kasus diare yang fluktuatif namun tetap berada pada angka yang signifikan. Secara rinci, insidensi diare tercatat sebanyak 128 kasus pada September, melonjak menjadi 152 kasus pada Oktober, sempat melandai ke angka 128 kasus pada November, sebelum akhirnya kembali meningkat hingga 141 kasus pada Desember. Tingginya angka kesakitan ini mengindikasikan adanya masalah kesehatan masyarakat yang disinyalir berkorelasi dengan rendahnya kualitas higiene sanitasi penjamah makanan. Dugaan tersebut diperkuat oleh hasil studi pendahuluan melalui observasi lapangan dan wawancara, yang mengonfirmasi bahwa penerapan higiene sanitasi oleh penjamah makanan di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Barat belum berjalan optimal. Praktik di lapangan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap standar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021, khususnya pada indikator kebersihan individu dan perilaku kerja. Hal ini terbukti dari dua temuan utama :

1. Mayoritas penjamah makanan (93%) belum memakai alat pelindung diri (APD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebagian besar penjamah makanan (63%) belum mengimplementasikan perilaku kebersihan diri secara konsisten selama tahapan pengolahan hingga penyajian hidangan.

Selain itu, masih terdapat penjamah makanan yang beranggapan bahwa penerapan hygiene sanitasi belum menjadi prioritas selama makanan tampak bersih secara visual. Selain aspek perilaku penjamah makanan, hasil pengamatan lapangan juga menunjukkan adanya faktor lingkungan yang berpotensi memengaruhi penerapan hygiene sanitasi. Beberapa lokasi tempat berjualan berada di dekat

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) serta seluruh warung makanan berlokasi di tepi jalan raya dengan kondisi lingkungan yang relatif berdebu. Meskipun seluruh warung telah menggunakan lemari pajangan berbahan kaca sebagai upaya perlindungan makanan, namun pada saat kondisi ramai pelanggan lemari tersebut sering dibiarkan terbuka sehingga masih memungkinkan akses masuk vektor. Keberadaan vektor, terutama lalat, masih ditemukan di sekitar area penjualan meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Selain itu, pengelolaan sampah juga belum sepenuhnya memenuhi prinsip kebersihan, yang terlihat dari masih adanya tempat sampah terbuka serta letaknya yang relatif dekat dengan area penyajian makanan. Temuan ini digunakan sebagai gambaran awal kondisi lapangan dan menjadi dasar perlunya intervensi penyuluhan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan hygiene sanitasi penjamah makanan masih rendah dan berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kontaminasi pangan. Pandangan tersebut menunjukkan perlunya upaya preventif dan promotif berupa intervensi penyuluhan untuk mendorong penjamah makanan melaksanakan hygiene sanitasi secara benar dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.

Keamanan pangan dan pencegahan kontaminasi mikroba sangat bergantung pada penerapan hygiene sanitasi oleh para penjamah makanan. Jika standar tersebut diabaikan—seperti tidak memakai alat pelindung diri (APD), jarang mencuci tangan, dan melakukan pengolahan yang tidak higienis—risiko pencemaran pangan akan meningkat. Fenomena ini terlihat di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Barat, di mana praktik hygiene sanitasi penjamah makanan dinilai belum maksimal, sehingga memicu ancaman kontaminasi dan penyakit bawaan makanan. Sebagai langkah preventif dan promotif, edukasi melalui penyuluhan kesehatan perlu

digencarkan guna mengubah perilaku pekerja agar lebih patuh pada regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, pamflet digunakan sebagai media edukasi karena keunggulannya yang praktis, komunikatif, dan dapat dibaca berulang kali. Sejalan dengan temuan Hidayat (2025), pamflet terbukti menjadi media penyuluhan yang valid dan efektif dalam mendorong perubahan perilaku sehat. Walau begitu, studi spesifik yang menguji efektivitas intervensi pamflet terhadap perilaku higiene sanitasi penjamah makanan di area Puskesmas I Denpasar Barat masih sangat terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Intervensi Penyuluhan Media Pamflet Terhadap Penerapan Hygiene Sanitasi Penjamah Makanan Di Wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar Barat”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas penyuluhan menggunakan media pamflet terhadap penerapan higiene sanitasi penjamah makanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi institusi kesehatan, terutama Puskesmas dan instansi terkait, dalam menyusun program edukasi kesehatan yang lebih inovatif, efektif, dan berkelanjutan guna mendukung keamanan pangan di wilayah berisiko.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang ingin diteliti adalah “Apakah intervensi penyuluhan menggunakan media pamflet efektif terhadap penerapan hygiene sanitasi penjamah makanan di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Barat?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas intervensi penyuluhan menggunakan media pamflet terhadap penerapan hygiene sanitasi penjamah makanan di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Barat.

2. Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, sebagai berikut ;

- a. Untuk menilai penerapan hygiene sanitasi penjamah makanan sebelum diberikan intervensi penyuluhan
- b. Untuk menilai penerapan hygiene sanitasi penjamah makanan sesudah diberikan intervensi penyuluhan
- c. Untuk menganalisis efektivitas penyuluhan menggunakan media pamflet terhadap penerapan hygiene sanitasi penjamah makanan sesuai Permekes Nomor 14 Tahun 2021

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan lingkungan, khususnya terkait penerapan hygiene sanitasi penjamah makanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan penulis dalam menerapkan konsep hygiene sanitasi penjamah makanan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penerapan hygiene sanitasi penjamah makanan pada pedagang di Wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar Barat sehingga dapat menurunkan risiko kontaminasi pangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi institusi kesehatan, khususnya Puskesmas dan instansi terkait, dalam merancang dan melaksanakan program penyuluhan kesehatan yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan guna menjamin keamanan pangan di wilayah berisiko.